

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2004.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Dunn, William N, *Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, *Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia*, (Jakarta, Departemen Penerangan RI), 1982.
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System. A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1986.
- Harsono, Boedi, *Undang Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya (edisi revisi 2007)*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Iskandar, Mudakir, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Lubis, Abdul Rahim, *Pencabutan Hak, Pembebasan Hak, dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muhajdir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarisin, Yogyakarta 1996.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Seidman, Robert B. & William J. Chambls, *Law, Order, and Power*, Printed in United States of America, Pubhlised Stimulant Costly in Canada Library of Congress.

- Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia*, (STIP Yogyakarta), 2004.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung, Alfabeta), 2008.
- Sugiarto, Umar Said Suratman, dan Muchsin, Noorhudha, *Hukum Pengadaan Tanah (Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi)*, Setara Press, Malang, 2015.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik (kajian pers dan analisis kebijakan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Sumardjono, Maria S.W, *Antara Kepentingan Pembangunan dan Keadilan "Forum Diskusi Alternatif"*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasinya*, Kompas, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, PT. Kompas, Jakarta, 2009.
- Sulaeman, Abdullah, *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, UNS Press, Surakarta, 2002.
- Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*, Pusat Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta, 2014.

## B. Jurnal

Santoso, Urip, “*Eksistensi Berlakunya Pencabutan Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012*”, Perspektif Volume 22 Nomor1 Edisi Januari, 2017.

## C. Peraturan PerUndang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

*Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Keepentingan Umum.*

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pembebasan Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Purbalingga.

#### **D. Website**

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga  
<https://dinrumkim.purbalinggakab.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> (diakses 12 September 2019. Pukul 21.15 WIB).

#### **E. Sumber lain**

Wawancara dengan Bapak Aris Budi Nugroho, S.Stp, sebagai Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 10.18 WIB. di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

Wawancara dengan Bapak Drs. Imam Hadi, M.Si, sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 11.12 WIB di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.